

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penerimaan Pajak Jakarta Diprediksi Lampau Target

Optimalisasi penagihan pajak ditargetkan menyumbang Rp 600 miliar.

JAKARTA — Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta, Faisal Syarifuddin, menyatakan optimistis penerimaan pajak daerah tahun ini akan melampaui target Rp 44,18 triliun. Target itu diprediksi terlewati setelah pemerintah DKI menetapkan kebijakan pemotonganpokoksertapenghapusan denda tunggakan sembilan jenis pajak.

“Dari kebijakan ini, kami memprediksi akan ada tambahan untuk penerimaan pajak daerah 2019 sekitar Rp 600 miliar,” kata Faisal di Balai Kota, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menekan dua peraturan yang memberikan keringanan kepada penunggak pajak daerah. Dengan memberikan insentif bagi penunggakpajak, pemerintah Jakarta pun menaikkan target pendapatan daerah 2019 dari Rp 74,77 triliun menjadi Rp 74,99 triliun.

Faisal menerangkan, hingga awal September lalu, penerimaan pajak daerah Jakarta hampir mencapai Rp 30 triliun. Angka itu lebih tinggi Rp 3 triliun dari penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu. “Penerimaan tahun ini akan lebih dari target,” kata Faisal menegaskan.

Pendapatan pajak Jakarta menjadi sorotan sejak laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Juli lalu. Kala itu, Dewan mempersoalkan tak tercapainya target penerimaan dari enam jenis pajak, yaitu pajak parkir, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan umum, dan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Faisal, pemerintah DKI telah mengkaji penyebab kegagalan capaian target pajak tahun lalu. Penerimaan pajak hiburan, misalnya, rendah karena sejumlah acara hiburan besar yang semula direncanakan di Jakarta berpindah lokasi ke luar kota, seperti Sentul, Bogor; Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan; dan Denpasar, Bali. Adapun penerimaan pajak penerangan jalan umum terkendala koordinasi dengan PT PLN (Persero).

Tahun ini, kata Faizal, pemerintah Jakarta berfokus untuk menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah DKI, misalnya, tengah membidik sekitar 1.000 kendaraan mewah dari total 2,2 juta unit kendaraan

bermotor yang menunggak pajak. “Kendaraan di atas Rp 1 miliar. Pajak mereka itu Rp 100-200 juta lebih,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, fasilitas pemotongan tunggakan pajak hanya berlaku hingga akhir tahun ini. Pada tahun depan, pemerintah Jakarta akan menagih pajak secara besar-besaran. Wajib pajak yang membandel akan dipasang tanda khusus. Pemerintah DKI juga berencana menerapkan sejumlah sanksi, seperti memblokir rekening bank, menyita atau melelang harta benda, mencabut izin usaha, hingga melakukan penyanderaan.

Anggota DPRD dari Partai Golkar, Ashraf Ali, meminta pemerintah Jakarta menindak tegas penunggak pajak dari sejumlah sektor yang tingkat penerimaannya masih rendah. Misalnya, pajak hiburan dan pajak air tanah. Dia juga menyarankan perbaikan sejumlah aturan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari pemasangan reklame dan parkir. “Lakukan pendataan secara kontinu atas wajib pajak,” kata dia.

● MARVELA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penerimaan Pajak Jakarta Diprediksi Lampaui Target

Target Pajak

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta optimistis kinerja penerimaan daerah 2019 lebih baik dari tahun lalu. Sejumlah kebijakan akan diterapkan untuk menembus penerimaan pajak dan retribusi Ibu Kota tahun ini.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)

Jenis Pajak	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi*
Pajak kendaraan bermotor	Rp 8,35	Rp 8,55	Rp 8,8	Rp 4,37
Bea balik nama kendaraan bermotor	Rp 5,1	Rp 5,35	Rp 5,4	Rp 2,67
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Rp 1,2	Rp 1,24	Rp 1,27	Rp 0,62
Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan	Rp 8,5	Rp 8,89	Rp 9,65	Rp 1,22
Pajak reklame	Rp 1,15	Rp 1,02	Rp 1,05	Rp 0,51
Pajak air tanah	Rp 0,106	Rp 0,145	Rp 0,145	Rp 0,048
Pajak hotel	Rp 1,7	Rp 1,74	Rp 1,8	Rp 0,79
Pajak restoran	Rp 3,15	Rp 3,15	Rp 3,55	Rp 1,73
Pajak hiburan	Rp 0,83	Rp 0,9	Rp 0,9	Rp 0,38
Pajak penerangan jalan	Rp 0,82	Rp 0,78	Rp 0,81	Rp 0,27
Pajak parkir	Rp 0,55	Rp 0,51	Rp 0,75	Rp 0,27
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp 6	Rp 4,72	Rp 9,5	Rp 1,85

*PER 10 JULI